

"Pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Publik Dengan Pengawasan Fungsional Sebagai Variabel Moderating "

(Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Malang)

Oleh:

Sunarti Mahmud, Abdul Wahid Mahsuni dan Junaidi

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang

E-mail: Sunartymahmud69@gmail.com/082340637211

ABSTRACT

In this era, along with the demands of society in order to Public Sector Organizations is maintaining quality, professionalism, public accountability and value for money in carrying out its activities as well as to ensure public accountability by public sector organism. Then required audit toward public sector organization. The purpose of this research is to know "How the influence of Public Sector Performance Audit toward Public Accountability, how the influence of Functional Supervisor toward Public Sector Performance Audit influencing Public Accountability, and how the influence of Functional Supervisor toward the relationship between Public Sector Performance Audit and Public Accountability on SKPD in the Government of Malang City". The population in the research is all of SKPD in the Government of Malang City. The samples that used were Head Office of SKPD in Malang City by purposive sampling method. Types of data used are primary data. The data analysis was used by multiple linear regression analysis. The result of this research shows that Public Sector Performance Audit, Functional Supervisor partially and Functional Supervisor and Public Sector Performance Audit have influence toward Public Accountability. And the Public Sector Performance Audit and Functional Supervisor simultaneously have influence toward Accountability Public.

Keyword : *Public Sector Performance Audit, Accountability Public, Functional Supervisor*

PENDAHULUAN

Selama ini sektor publik tidak luput dari tuduhan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, dan sumber pemborosan negara. Keluhan "Birokrat tidak mampu berbisnis" ditujukan untuk mengkritik buruknya kinerja perusahaan-perusahaan sektor publik. Pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik pun tidak luput dari tuduhan ini. Organisasi sektor publik pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan good governance ini dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat. Hal ini semakin penting untuk dilakukan dalam era reformasi ini melalui pemberdayaan peran lembaga-lembaga kontrol sebagai pengimbang kekuasaan pemerintah.

Perubahan pada sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi mendorong perlunya perbaikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban, maka dalam era otonomi daerah sekarang ini daerah

diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat, pemberian otonomi daerah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan-kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk itu, otonomi daerah diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. (Mardiasmo, 2002).

Saat ini di Indonesia sedang dilakukan persiapan penyusunan suatu standar akuntansi pemerintahan yang lebih baik serta pembicaraan yang intensif mengenai peran akuntan publik dalam memeriksa keuangan negara maupun keuangan daerah. Namun tampak bahwa akuntabilitas pemerintahan di Indonesia masih berfokus pada sisi pengelolaan keuangan negara atau daerah. Memasuki era reformasi, masyarakat di sebagian besar wilayah Indonesia, baik di propinsi, kota maupun kabupaten mulai membahas laporan pertanggungjawaban kepala daerah masing-masing dengan lebih seksama. Beberapa kali terjadi pernyataan ketidakpuasan atas kepemimpinan kepala daerah dalam melakukan manajemen pelayanan publik maupun penggunaan anggaran belanja daerah. Melihat pengalaman di negara-negara maju, ternyata dalam pelaksanaannya, keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya oleh informasi keuangan saja. Masyarakat ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi dengan ekonomis, efisien dan efektif.

Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta value for money dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut. Audit yang dilakukan tidak hanya terbatas pada audit keuangan dan kepatuhan, namun perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja organisasi sektor publik tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka penelitian ini yang berjudul **“Pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Publik dengan Pengawasan Fungsional sebagai variabel Moderating”**.

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Audit Sektor Publik

Pengertian audit sektor publik menurut Indra Bastian adalah “jasa penyelidikan bagi masyarakat atas organisasi publik dan politikus yang sudah mereka dani.”

Sedangkan menurut Rai (2008) adalah sebagai berikut: “Audit sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang ditetapkan.”

Audit Kinerja

Audit kinerja, meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Audit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi

dan efisiensi operasi, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut.

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberikan amanah.

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktifitas yang dilakukan.

Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggungjawabnya. Pengawasan fungsional merupakan bagian penting dalam praktik pengawasan di Indonesia. Adapun fungsi atau peranan dari pengawasan fungsional adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pengawasan menurut Ulum (2009) adalah : “Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.”

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

H₁ : Terdapat pengaruh audit kinerja sektor publik terhadap akuntabilitas publik pada SKPD di Pemerintah Kota Malang

Audit kinerja sektor publik secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas publik.

H₂ : Terdapat pengaruh pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik pada SKPD di Pemerintah Kota Malang

Pengawasan fungsional secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas publik.

H₃ : Terdapat pengaruh pengawasan fungsional pada hubungan audit kinerja sektor publik dengan akuntabilitas publik pada SKPD di Pemerintah Kota Malang

Pengawasan fungsional dan audit kinerja sektor publik secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas publik, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan fungsional dan audit kinerja sektor publik mempunyai pengaruh dengan akuntabilitas publik.

METODOLOGI PENELITIAN

Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas. Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Audit Kinerja Sektor Publik dan Variabel Moderating Pengawasan Fungsional.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian adalah semua SKPD di Pemerintahan Kota Malang. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah Kepala SKPD kota Malang.

Metode Analisa Data

Tahap-tahap dalam menganalisis data adalah melakukan uji statistik deskriptif, uji asumsiklasik, dan uji hipotesis dengan analisis regresi linier berganda. sedangkan model perumusan yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y=a+b_1X_1+b_2X_2$$

Dimana:

a = Konstanta

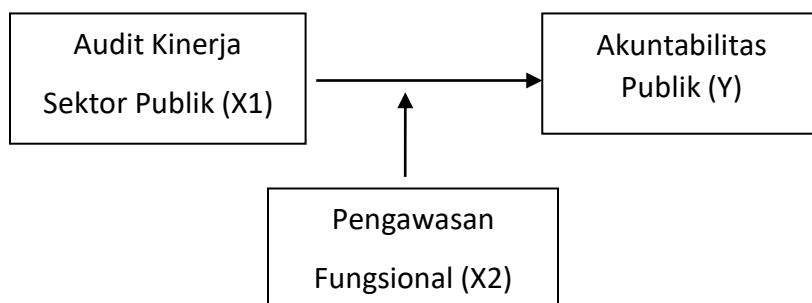
b = Koefisien Regresi

Y = Akuntabilitas Publik

x1 = Audit Kinerja

x2 = Pengawasan Fungsional

Model Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh SKPD di Pemerintahan kota Malang. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepala SKPD kota Malang.

Berdasarkan tabel 4.5, didapat statistik deskriptif jawaban Kuesioner yang kembali sebanyak 39 kuesioner atau 97,5%. Sedangkan yang tidak kembali sebanyak 1 kuesioner atau 2,5%. Total kuesioner yang dapat diolah dari jumlah keseluruhan kuesioner yang disebarkan adalah 39 kuesioner atau 97,5%.

1. Jawaban responden atas variabel Audit Kinerja Sektor Publik (X1) mempunyai nilai *maximum* sebesar 28 nilai *minimum* sebesar 19 dan mempunyai nilai rata-rata jawaban responden 919 dengan standar deviasi 2.036.
2. Jawaban responden atas variabel Pengawasan Fungsional (X2) mempunyai nilai *maximum* sebesar 34 nilai *minimum* sebesar 23 dan mempunyai nilai rata-rata jawaban responden 1155 dengan standar deviasi 2.290.
3. Jawaban responden atas variabel Akuntabilitas Publik (Y) mempunyai nilai *maximum* sebesar 29 nilai *minimum* sebesar 20 dan mempunyai nilai rata-rata jawaban responden 975 dengan standar deviasi 2.152.

Uji Validitas

Uji Validitas Audit Kinerja Sektor Publik

Dari tabel 4.6 terlihat jika nilai *Pearson correlation* hasil pengujian untuk variabel Audit Kinerja Sektor Publik disimpulkan Valid karena, nilai Sig dibawah 0,05.

Uji Validitas Pengawasan Fungsional

Dari tabel 4.7 terlihat jika nilai *Pearson correlation* hasil pengujian untuk variabel Pengawasan Fungsional disimpulkan Valid karena, nilai Sig dibawah 0,05.

Uji Validitas Akuntabilitas Publik

Dari tabel 4.8 terlihat jika nilai *Pearson correlation* hasil pengujian untuk variabel Akuntabilitas Publik disimpulkan Valid karena, nilai Sig dibawah 0,05.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas Audit Kinerja Sektor Publik

Dari tabel 4.9 terlihat jika nilai *Cronbach's Alpha* hasil pengujian untuk variabel Audit Kinerja Sektor Publik adalah 0,628>0,60 yang artinya instrumen variabel Audit Kinerja Sektor Publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

Uji Reliabilitas Pengawasan Fungsional

Dari tabel 4.10 terlihat jika nilai *Cronbach's Alpha* hasil pengujian untuk variabel Pengawasan Fungsional adalah 0,657>0,60 yang artinya instrumen variabel Pengawasan Fungsional yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

Uji Reliabilitas Akuntabilitas Publik

Dari tabel 4.11 terlihat jika nilai *Cronbach's Alpha* hasil pengujian untuk variabel Akuntabilitas Publik adalah 0,608>0,60 yang artinya instrumen variabel Akuntabilitas Publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji Normalitas pada Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa:

- Nilai *kolmogorov-smirnov* untuk Audit Kinerja Sektor Publik sebesar 0,992 dengan signifikansi 0,279. Nilai Sig= 0,279>a =0,05 mempunyai arti bahwa data terdistribusi normal.
- Nilai *kolmogorov-smirnov* untuk Pengawasan Fungsional sebesar 1.062 dengan signifikansi 0,209. Nilai Sig= 0,209>a =0,05 mempunyai arti bahwa data terdistribusi normal
- Nilai *kolmogorov-smirnov* untuk Audit Kinerja Sektor Publik sebesar 0,717 dengan signifikansi 0,683. Nilai Sig= 0,683>a =0,05 mempunyai arti bahwa data terdistribusi normal

Uji Asumsi Klasik

Dasar Analisis dari Uji heteroskedastisitas melalui *chart* (diagram *Scatterplot*) adalah jika tidak ada pola tertentu, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawa angka 0 pada sumbu Y secara acak, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dari gambar 4.1 dapat diketahui bahwa data titik menyebar secara merata diatas dan dibawah garis 0, serta tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji regresi ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

tidak ada korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas, dimana nilai VIF dari kedua variabel bebas masih lebih kecil dari 10 dan dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara kedua variabel bebas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Dari data tabel 4.14 diatas maka dapat disusun persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2$$

$$\text{Akuntabilitas Publik} = 22.274 - 0,417 \text{ Audit kinerja} + 0,424 \text{ Pengawasan Fungsional}$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat diketahui bahwa:

- Nilai konstanta bernilai positif sebesar 22.274 dapat diartikan apabila semua variabel bebas yang meliputi Audit Kinerja Sektor Publik dan Pengawasan Fungsional dianggap konstan (Audit Kinerja Sektor Publik dan Pengawasan Fungsional = 0), maka akan mempunyai nilai sebesar 22.274
- Koefisien regresi Audit Kinerja Sektor Publik bernilai negatif sebesar -0,417 menggambarkan bahwa setiap terjadi kenaikan Audit Kinerja Sektor Publik sebesar 1 poin akan menyebabkan nilai menurun sebesar -0,417 (Variabel Audit Kinerja Sektor Publik dianggap Konstan).
- Koefisien regresi Pengawasan Fungsional bernilai positif sebesar 0,424 menggambarkan bahwa setiap terjadi kenaikan Pengawasan Fungsional sebesar 1 poin akan menyebabkan naik sebesar 0,424 (variabel Pengawasan Fungsional dianggap konstan).

Uji Hipotesis

Berdasarkan tabel 4.15 diatas menunjukkan nilai F sig sebesar 6,997. jika dibandingkan dengan F tabel yaitu 2,866 maka F sig lebih besar dari F tabel ($6,997 > 2,866$). Nilai signifikan sebesar 0,003 juga menunjukkan nilai yang lebih kecil dari tingkat signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05 ($0,003 < 0,05$). Artinya bahwa variabel independen (Audit Kinerja sektor publik dan Pengawasan fungsional) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Akuntabilitas publik) yang diukur dengan beberapa indikator.

Berdasarkan tabel penelitian 4.16 bisa diketahui bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen akuntabilitas yang dinyatakan dengan nilai koefisien determinasi (R^2) yaitu 0,280. Yang artinya sebesar 28,0% variabel akuntabilitas mampu dijelaskan oleh variabel audit kinerja sektor publik dan pengawasan fungsional sisanya sebesar 72,0% dijelaskan oleh variabel lain contohnya pelayanan publik, kualitas informasi keuangan dan manajerial.

Berdasarkan dari tabel 4.17 diatas dapat disimpulkan bahwa:

- Pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Publik pada SKPD dipemerintahan kota Malang.
Berdasarkan tabel 4.17 dapat diketahui bahwa nilai t sig sebesar -2,720 dengan nilai signifikan 0,010 ($\text{sig} < 0,05$) maka hasil pengujian menunjukkan bahwa Audit kinerja sektor publik secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas publik. Koefisien regresi Audit kinerja sektor publik diketahui mempunyai nilai -0,417. Nilai ini menunjukkan bahwa Audit kinerja sektor publik bernilai negatif, artinya bahwa setiap terjadi kenaikan Audit kinerja sektor publik sebesar 1 poin maka akan menyebabkan penurunan nilai sebesar -0,417 (Variabel Audit kinerja sektor publik dianggap Konstan).
Dari hasil ini diketahui bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, audit kinerja sektor publik berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahayu (2011) bahwa audit kinerja sektor publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik.
- Pengaruh Pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik pada SKPD dipemerintahan kota Malang.
Berdasarkan tabel 4.17 dapat diketahui bahwa nilai t sig sebesar 3,109 dengan nilai signifikan 0,004 ($\text{sig} < 0,05$) maka hasil pengujian menunjukkan bahwa Pengawasan fungsional secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas publik. Koefisien regresi Pengawasan fungsional

diketahui mempunyai nilai 0,424. Nilai ini menunjukkan bahwa Pengawasan fungsional bernilai positif, artinya bahwa setiap terjadi kenaikan Pengawasan fungsional sebesar 1 poin maka akan menyebabkan naik sebesar 0,424 (Variabel Pengawasan fungsional dianggap Konstan).

Dari hasil ini diketahui bahwa H0 ditolak dan H2 diterima, Pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahayu (2011) bahwa Pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik.

- c. Pengaruh Pengawasan fungsional pada hubungan audit kinerja sektor publik dengan akuntabilitas publik pada SKPD dipemerintahan kota Malang.

Berdasarkan tabel 4.17 dapat diketahui bahwa pengawasan fungsional nilai t sig 3,109 dengan nilai signifikan 0,004 ($\text{sig} < 0,05$) dan nilai t sig audit kinerja sektor publik sebesar -2,720 dengan nilai signifikan 0,010 ($\text{sig} < 0,05$) maka hasil pengujian menunjukkan bahwa Pengawasan fungsional dan audit kinerja sektor publik secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas publik. Koefisien regresi Pengawasan fungsional diketahui mempunyai nilai 0,424, Koefisien regresi audit kinerja sektor publik diketahui mempunyai nilai -0,417. Nilai ini menunjukkan bahwa Pengawasan fungsional dan audit kinerja sektor publik bernilai positif dan negatif, artinya bahwa setiap terjadi kenaikan Pengawasan fungsional dan audit kinerja sektor publik sebesar 1 poin maka akan menyebabkan nilai naik sebesar 0,424 (Variabel Pengawasan fungsional dianggap Konstan) dan nilai menurun -0,417 (Variabel Audit kinerja sektor publik dianggap Konstan).

Dari hasil ini diketahui bahwa H0 ditolak dan H3 diterima, Pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahayu (2011) bahwa Pengawasan fungsional dan audit kinerja sektor publik berpengaruh signifikan dengan akuntabilitas publik.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Audit kinerja sektor publik dan Pengawasan fungsional secara bersama-sama berpengaruh terhadap Akuntabilitas publik
2. Audit kinerja sektor publik secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas publik.
3. Pengawasan fungsional secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas publik.
4. Pengawasan fungsional dan audit kinerja sektor publik secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas publik, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan fungsional dan audit kinerja sektor publik mempunyai pengaruh dengan akuntabilitas publik.

Keterbatasan

Adapun penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian dengan hasil yang baik.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Jumlah SKPD yang diteliti hanya menggunakan 39 SKPD atau tidak secara keseluruhan dari jumlah SKPD yang ada.
2. Dalam penelitian ini hanya meneliti audit kinerja sektor publik, pengawasan fungsional dan akuntabilitas publik atau masih banyak faktor yang belum masuk dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat
diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan pemberian informasi mengenai pertanggungjawaban pemerintah dalam pembangunan.
2. Bagi Pemerintah
Atas dasar hasil penelitian ini, sebaiknya Pemerintah lebih meningkatkan pengawas fungsional terhadap SKPD yang ada agar akuntabilitas publiknya lebih baik.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Peneliti selanjutnya dapat menambahkan jumlah sampel yang diteliti dan menambahkan faktor-faktor lain sebagai variabel independen dan moderatingnya yang dapat menunjang akuntabilitas publik, karena sangat memungkinkan faktor lain yang dimasukan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Audit Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah. <http://blog.re.or.id/management-audit-sektor-publik.htm> (diakses tanggal 07 mei 2017).
- Bastian, Indra. 2003. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Visi Global Media
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit Erlangga
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 4. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghazali, Imam, 2016, “*Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 23*”, Cetakan kedelapan, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah
- Mahmudi. 2007. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Murwanto, Rahmadi. Budiarso, Adi. Ramadhana, Fajar, Hasri. 2000. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar bagi Pembangunan Akuntabilitas bagi Instansi Pemerintah*. Depatemen Keuangan RI. suhardi.ubb.ac.id (diakses tanggal 29 Mei 2012)
- Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (www.google.com) [09/12/2012]
- Priyatno, Duwi, 2013, “*Mandiri Belajar Analisis Data Dengan SPSS*”, Yogyakarta: Media Kom.
- Priyatno, Duwi, 2014, “*SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis*”, Edisi 1, Yogyakarta: ANDI.
- Rai, I Gusti, Agung. 2008. *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Rahayu, Cici. 2011. Pengaruh Audit kinerja Sektor Publik dan Pengawasan fungsional terhadap Akuntabilitas Publik. Skripsi. UNIKOM. Bandung.

Sadeli, Dadang. 2008. Profesionalitas Aparat Pengawasan Fungsional Intern Terhadap Pelaksanaan Audit Pemerintahan dan Implikasinya Kepada Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Daerah. UPI. Vol. 10, No. 2. Agustus. Hlm. 101-111.

Santoso, Singgih, 2013, *“Menguasai SPSS 21 di Era Informasi”*. PT.ELEK Media Komputindo. Jakarta.

Supardi, Deddy. Wiarty, Sheirly. 2009. Peranan Audit Kinerja dalam Akuntabilitas. UNIKOM. Vol. I, No. 2. April. Hlm. 77-94.

Ulum, Ihyaul. 2009. Audit Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta : Bumi Aksara.

UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Wilopo. 2001. “Faktor-faktor yang Menentukan Kualitas Audit pada Sektor Publik/Pemerintah”. Ventura. STIE Perbanas Surabaya. Vol. 4 No. 1. Juni. pp. 27 – 32.

www.malangkota.go.id

Lampiran

Xa	Pearson Correlation	.368[*]	.428^{**}	.522^{**}	.476^{**}	.315	.587^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	.021	.007	.001	.002	.051	.000	
	N	39	39	39	39	39	39	39

tabel 4.6

Xb	Pearson Correlation	.591^{**}	.347[*]	.603^{**}	.401[*]	.453^{**}	.351[*]	.398[*]	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.030	.000	.011	.004	.028	.012	
	N	39	39	39	39	39	39	39	39

tabel 4.7

Y	Pearson Correlation	.332 *	.604 **	.405 *	.406 *	.369 *	.362 *	.317 *	1
	Sig. (2-tailed)	.039	.000	.011	.010	.021	.023	.049	
	N	39	39	39	39	39	39	39	39

tabel 4.8

Cronbach's Alpha	N of Items
.628	7

tabel 4.9

Cronbach's Alpha	N of Items
.657	8

tabel 4.10

Cronbach's Alpha	N of Items
.608	8

tabel 4.11

		audit kinerja sektor publik	pengawasan fungsional	akuntabilitas publik
N		39	39	39
Normal Parameters^a	Mean	23.56	29.62	25.00
	Std. Deviation	2.036	2.290	2.152
Most Extreme Differences	Absolute	.159	.170	.115
	Positive	.159	.170	.106
	Negative	-.098	-.163	-.115
Kolmogorov-Smirnov Z		.992	1.062	.717
Asymp. Sig. (2-tailed)		.279	.209	.683

Tabel 4.12

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22.274	4.791		4.649	.000
	audit kinerja sektor publik	-.417	.153	-.395	-2.720	.010
	pengawasan fungsional	.424	.136	.451	3.109	.004
a. Dependent Variable: akuntabilitas publik						

tabel 4.14

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	49.264	2	24.632	6.997	.003 ^a
	Residual	126.736	36	3.520		
	Total	176.000	38			
a. Predictors: (Constant), pengawasan fungsional, audit kinerja sektor publik						
b. Dependent Variable: akuntabilitas publik						

Tabel 4.15

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.529 ^a	.280	.240	1.876

tabel 4.16

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22.274	4.791		4.649	.000
	audit kinerja sektor publik	-.417	.153	-.395	-2.720	.010
	pengawasan fungsional	.424	.136	.451	3.109	.004
a. Dependent Variable: akuntabilitas publik						

tabel 4.17